

PENGASINGAN SOEKARNO DAN MOHAMMAD HATTA DI KOTA MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 1948-1949

Mia Oktavia 1, Maskun 2, Suparman Arif 3 *

¹²³Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia.

*Corresponding e-mail: mimiaoktavia@gmail.com

ABSTRAK

Pengasingan Soekarno Dan Mohammad Hatta Di Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 1948-1949. Tanggal 19 Desember 1948 Belanda telah melakukan Agresi Militer Agresi Militer Belanda II dilancarkan presiden dan wakil presiden serta beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Bangka Belitung menjadi salah satu tempat Soekarno dan Hatta diasingkan oleh Belanda. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni apasajakah aktivitas politik soekarno dan Mohammad Hatta pada saat diasingkan di kota Muntok tahun 1948-1949 dalam rangka mengembalikan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode historis yakni: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Agresi militer II yang diluncurkan oleh Belanda membuat kedaulatan Negara Indonesia terancam. Diasingkannya Soekarno dan Mohammad Hatta tidak membuat aktivitas politik yang dapat menunjang pengembalian kedaulatan terhenti. Aktivitas politik tersebut tetap dilakukan yang berupa membangkitkan semangat pemuda Muntok, merumuskan naskah diplomasi kedaulatan Republik Indonesia yang menjembatani kembalinya kedaulatan Republik Indonesia dan melakukan diplomasi dalam mengembalikan kedaulatan Republik Indonesia yang dilakukan dengan berbagai pihak seperti UNCI, PBB, KTN dan BFO. Kesimpulan dari penelitian ini yakni terdapat tiga aktivitas politik Soekarno dan Mohammad Hatta Dalam Mengembalikan kedaulatan RI. Aktivitas politik yang dilakukan berhasil menunjang kembalinya kedaulatan RI. Sehingga terjadi penyerahan dan pengakuan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949.

Kata kunci: Pengasingan, Aktivitas Politik, Soekarno, Mohammad Hatta, Kota Muntok.

ABSTRACT

Exiling of Soekarno and Mohammad Hatta in the City of Muntok, West Bangka Regency, 1948-1949. On December 19, 1948, the Dutch carried out Military Aggression. The Second Dutch Military Aggression was launched by the president and vice president and several other high-ranking officials were taken prisoner by the Dutch. Bangka Belitung became one of the places where Soekarno and Hatta were exiled by the Dutch. The formulation of the problem from this research is what were the political activities of Soekarno and Mohammad Hatta when they were exiled in the city of Muntok in 1948-1949 in order to restore the Republic of Indonesia. The method used in this research is using historical methods, namely: Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. The results of this study indicate: The military aggression II launched by the Dutch made the sovereignty of the State of Indonesia threatened. The exile of Soekarno and Mohammad Hatta did not stop political activities that could support the restoration of sovereignty. These political activities are still being carried out in the form of raising the spirit of Muntok youth, formulating a diplomatic script of the sovereignty of the Republic of Indonesia which bridges the return of the sovereignty of the Republic of Indonesia and conducting diplomacy in restoring the sovereignty of the Republic of Indonesia which is carried out with various parties such as UNCI, PBB, KTN and BFO. The conclusion of this research is that there are three political activities of Soekarno and Mohammad Hatta in restoring the sovereignty of the Republic of Indonesia. The political activities carried out succeeded in supporting the return of Indonesian sovereignty.

Keywords: Exile, Political Activities, Soekarno, Mohammad Hatta, Muntok City

I. PENDAHULUAN

Tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Ir. Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 (sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan), pada pukul 11.30 (waktu Jawa pada zaman Jepang) atau pukul 10.00 WIB sekarang oleh Sukarno dan Hatta (Poesponegoro, 2008: 149). Secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan (Wulandari, 2014: 5). Sejak itu pula harapan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan asing menjadi nyata dan disambut dengan gembira rakyat Indonesia. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang yakni dari Pemerintahan Belanda (Widiatmoko, 2010: 39). Belanda bermaksud mengembalikan kekuasaannya. Upaya ini ditunjukkan melalui jalur diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun dengan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.

Di samping melalui jalur Diplomasi dan Agresi Militer Belanda, Belanda juga melakukan penangkapan. Maka banyak tokoh-tokoh pejuang bangsa ini yang terus dikejar oleh pihak Belanda. Salah satunya adalah Bung Karno dan Bung Hatta, dan untuk kesekian kalinya mereka kembali diasingkan (TWH, 2011:85). Krisnadi berpendapat bahwa strategi pengasingan politik dalam arti membuang seseorang ketempat politik yang jauh dari tanah asalnya karena alasan politik. Strategi ini dilakukan sejak jauh sebelum orang Eropa datang ke Indonesia. Para raja atau pangeran menculik lawan politik dan anggota keluarganya untuk mencapai tujuan mereka (Krisnadi, 2001: 49).

Kemudian menurut Langgeng Sulistyo Budi pengasingan, adalah mengenai cara pemerintah kolonial memperlakukan para tahanan politik. Perlu diketahui bahwa mereka berada di kamp pengasingan diikuti oleh anggota keluarganya, dan bahkan ada anak-anak mereka yang lahir di sana (Budi, 2017: 113). Menurut Hilmar Farid pengasingan politik adalah sebuah langkah efektif untuk meredam perlawanan dengan memisahkan pemimpin dari pendukung dan rakyat pada umumnya (Farid, 2013: 104). Pengasingan nampaknya tidak lagi asing bagi para pemimpin kita terdahulu. Pembuangan ini merupakan langkah Belanda untuk menghentikan aktivitas politik Bung Karno dan Bung Hatta yang dinilai membahayakan eksistensi Belanda (Adams, 2007: 153).

Presiden Soekarno ke Prapat Sumatera Utara dan Wakil Presiden Moh.Hatta dibuang ke Bangka. Beberapa bulan kemudian Presiden Soekarno dipindahkan ke Bangka (Seno, dkk, 2012: 97-98). Bangka Belitung menjadi salah satu tempat Soekarno dan Hatta diasingkan oleh Belanda. Kali ini Soekarno dan Hatta diasingkan dengan 6 orang tokoh lainnya, yakni Mr. Ali Sastroamidjojo, Moh. Roem, Mr. Assat, Suryadharma, AG Priggodigdo dan Agus Salim (Swastiwi, Nugroho dan Purnomo, 2017: 52). Sejarah kedaulatan Negara Republik Indonesia dirintis dari sebuah kota kecil Muntok, Pulau Bangka. Kota Muntok merupakan daerah yang dipilih oleh Belanda sebagai salah satu tempat Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia diasingkan, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta pada tahun 1948-1949. Meskipun sedang diasingkan oleh Belanda Soekarno dan Mohammad Hatta tetap melakukan aktivitas atau kegiatan politik meskipun dengan berbagai keterbatasan di temat pengasingan guna mengembalikan kedaulatan negara Indonesia yang direbut oleh pemerintahan Belanda. Muntok menjadi salah satu bagian perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kedaulatan Negara Indonesia. Pesanggrahan Muntok (Wisma Ranggam) dan Pesanggrahan Menumbing menjadi saksi dimana Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan dengan 6 tokoh lainnya dan menghabiskan waktu selama pengasingan

berjuang untuk mengembalikan kedaulatan Negara Indonesia yang diusik oleh Belanda. Kemudian, karena perjuangan Soekarno dan Mohammad Hatta saat pengasingan di Kota Muntok dengan tetap melakukan segala aktivitas atau kegiatan politik guna mengembalikan kedaulatan Negara Indonesia yang direbut oleh pemerintah Belanda dalam Agresi Militer II, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul Pengasingan Soekarno dan Mohammad Hatta Di Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 1948-1949.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2007) adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode sejarah merupakan suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Tahapan dalam metode sejarah yakni Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi (Wasino & Hartatik, 2018 : 11).

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitiannya. Pada penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Kepustakaan
Menurut Mestika Zed, metode kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004 : 4).
2. Teknik Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, foto, transkrip, biografi, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.
3. Teknik Wawancara
Wawancara juga biasa disebut dengan metode interview atau disebut sebagai metode wawancara. Menurut Abu Ahmadi Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Ahmadi, 2006: 83).

Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Menurut Sartono Kartodirdjo (1982), teknik analisis historis adalah analisis yang mengutamakan ketajaman dan kekuatan dalam menginterpretasikan data sejarah. Interpretasi dilakukan karena fakta-fakta tidak dapat berdiri sendiri dan kategori dari fakta-fakta memiliki sifat yang kompleks.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggal 19 Desember 1948, Belanda dengan cara medadak menyerang lapangan terbang Maguwo, dan berhasil menduduki Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Agresi pertama yang terjadi tanggal 21 Juli 1947, dan Agresi II memang menyelesaikan apa yang belum tercapai pada tanggal 21 Juli tersebut.

Pucuk pimpinan republik Indonesia ditangkap dan diasingkan di dua tempat:

1. Presiden Soekarno, H. Agus Salim (pada saat itu Menteri Luar Negeri), dan Sutan Sjahrir (Penasihat Presiden) diasingkan di Berastagi, kemudian dipindahkan di Prapat.
2. Wakil Presiden Hatta, Ketua Badan Pekerja Mr. Assa'at, Sekertaris Presiden Abdul Gafar Pringgodigdo, dan Panglima AURI Suryadarma diasingkan di Bangka. Pada akhir tahun 1948, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo dan Ketua Delegasi Republik Indonesia Mohammad Roem juga diasingkan dengan para tawanan di Bangka.

Diasingkannya para tokoh petinggi Republik Indonesia, Belanda Berharap agar mereka tidak dapat melakukan kegiatan yang dapat membahayakan Belanda. Tujuan Belanda menempatkan para pemimpin bangsa Indonesia di Muntok agar mereka terasing dan jauh dari rakyat. Belanda mengira Bangka masih dalam pengaruh dan kekuasaan Belanda sehingga tidak ada simpati dan dukungan terhadap tokoh Republik yang diasingkan. Namun, masyarakat Bangka justru mendorong dan mendukung kemerdekaan penuh Indonesia. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, rakyat Bangka memiliki jiwa Republikan yang tinggi dan diasingkannya Soekarno, Mohammad Hatta serta para tokoh lainnya tidak membuat mereka berhenti melakukan aktivitas yang bersifat politik guna mengembalikan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Aktivitas-aktivitas politik yang mendorong kembalinya Kedaulatan Republik Indonesia dilakukan di sebuah kota Kecil Muntok. Aktivitas politik tersebut berupa.

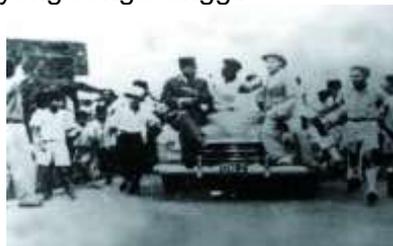
1. Membangkitkan Semangat Nasionalisme Masyarakat Muntok

Pengasingan para tokoh republik di Bangka, diawali dengan dugaan bahwa Pulau Bangka relatif aman dan kondusif bagi Belanda. Jauh dari para pemimpin dengan kaum republikan dan memiliki fasilitas yang cukup memadai (fasilitas perusahaan timah Belanda). Sebuah pandangan yang ternyata salah. Awalnya kehadiran tokoh republik di Menumbing dirahasiakan oleh Belanda dari masyarakat Bangka. Ketika kunjungan Komisi Tiga Negara (KTN) ke Menumbing untuk bertemu dengan Drs. Moh. Hatta, dan kemudian di bawa ke Pangkal Pinang akhirnya rakyat Bangka mengetahui bahwa Hatta dan lainnya benar adanya berada di Bangka. Sehingga berita tersebut tersebar dengan cepat.

Selama di Menumbing, Bung Hatta memprakasai pertemuan kecil dengan masyarakat Muntok. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi beliau untuk ceramah dan kursus politik dan ekonomi. Membekali para pemuda dengan pemikiran membangun Indonesia merdeka (kutementok.com). Bahkan saat Soekarno hendak tiba di Bandara Pangkal Pinang, rakyat Bangka telah siap untuk menyambut Presiden Soekarno. Bersiapnya rakyat Bangka menyambut tersebut dikarenakan bocornya berita bahwa Soekarno akan tiba di lapangan udara Kampung Dul Pangkal Pinang, sehingga hal tersebut membuat rakyat bangka bersiap-siap menyambut pemimpin RI pada masa itu. Bocornya berita tersebut membuat rakyat bangka sudah terlihat berbondong-bondong menunggu dipinggir jalan besar pada tanggal 6 Februari 1949. Namun tersiar kabar kembali bahwa tokoh besar itu tiba dengan pesawat Catalina (amphibi) lewat pelabuhan Pangkalbalam, sehingga rakyat Bangka dengan buru-buru pergi menuju Pangkalbalam yang berjarak 14 Km dari Kampung Dul.

Pelabuhan telah dijaga ketat oleh polisi kolonial, datang tiga buah mobil sedan dan berhenti di pinggir dermaga yang ternyata penumpangnya adalah Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), Ateng Karmamiharja, Dr. Darma Setiawan, Sujono, Dr J. Leimena, dan Mr. Roem. Seketika bergema pekik merdeka, pekikan

tersebut serempak diteriakan bersama-sama oleh warga Muntok. Sekitar pukul 10.00 pesawat Catalina mendarat. Pekik merdeka pun kembali terdengar tak terkendali. Pekik merdeka tidak putus sepanjang jalan hingga rombongan melanjutkan perjalanan ke Muntok. Di Muntok rakyat sudah menunggu di Daerah Pal I, menyerbu dan menahan mobil yang ditumpangi Bung Karno dan K.H Agus Salim, salam “merdeka” berhamburan dari rakyat Muntok (kutementok.com). Hal tersebut membuktikan bahwa jiwa republikan yang dianggap Belanda tidak ada ternyata berbanding terbalik, rakyat Muntok memiliki jiwa republikan yang sangat tinggi.



Sambutan Masyarakat ketika Soekarno Tiba di Bangka
(Sumber: Lembaga Kearsipan Daerah Bangka Barat)

Presiden Soekarno yang pada awalnya ditempatkan di pesanggrahan Menumbing, meminta untuk dipindahkan ke Pesanggrahan Muntok atau Pesanggrahan Banka Tin Winning (BTW) di Muntok dengan alasan memiliki penyakit asma dan tidak tahan akan dinginnya puncak menumbing, yang kemudian permintaan dikabulkan sehingga Soekarno, Agus Salim dan Moh. Roem dipindahkan ke Pesanggrahan Muntok atau Pesanggrahan BTW.

Kemudian agar Soekarno dapat lebih dekat dengan rakyat Muntok, Soekarno kerap kali datang ke tempat umum. Hal tersebut diharapkan oleh Soekarno dapat membuat rasa cinta akan tanah air Indonesia lebih besar yang pada dasarnya jiwa republikan dari masyarakat muntok sudah sangat besar. Mengunjungi tempat-tempat yang ramai akan masyarakat Muntok diharapkan dapat membuat Soekarno dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Tak hanya itu Soekarno juga kerap datang diacara masyarakat Muntok seperti pada pernikahan masyarakat Muntok, pernikahan tersebut yakni pernikahan A.M. Jusuf Rasidi dan Sholeh binti Said Yazan di Kota Muntok pada bulan 2 April 1949. Pernikahan tersebut selain dihadiri oleh Soekarno juga dihadiri oleh tokoh lain yang diasingkan. Didalam pernikahan tersebut khotbah nikah disampaikan oleh H. Agus Salim, dengan pesan dan nasehat untuk kedua mempelai. Kemudian Soekarno memanfaatkan acara pernikahan yang dihadiri oleh 5000 orang tersebut untuk melakukan pidato selama 1 jam dan membakar semangat rakyat, bahkan dilanjutkan lagi di pesanggrahan hingga malam hari (Seno, 2020:12).



Soekarno dan para tokoh lainnya
bersama keluarga pengantin Jusuf Rasidi dan Soleha
(Sumber: kutementok.com)

Kemudian dalam meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Muntok terdapat sebuah acara yang sangat berkesan bagi warga Muntok dan para tokoh yang diasingkan di Bangka, acara tersebut yakni Piknik PORI (Perkumpulan Olahraga Republik Indonesia) bersama tokoh Republik ke Tanjung Kalian-Muntok. Peristiwa tersebut merupakan jalan-jalan bersama menyusuri Pantai Tanjung Kalian yang terjadi pada bulan Maret 1949. Menurut RA Inderawati (dalam Seno, Dkk, 2020: 27) acara ini diikuti sekitar 70 orang pemuda-pemudi PORI.



Piknik PORI Bersama Tokoh Republik
(Sumber: Lembaga Kearsipan Daerah Bangka Barat)

Menurut A.A Bakar (dalam Seno, Dkk: 2020:27) di dalam buku Kenangan Manis dari Menumbing menyebutkan kegiatan jalan bersama ini sebagai kenangan tidak terlupakan bagi masyarakat Bangka. Sepanjang jalan dinyanyikan lagu mars. Acara tersebut dibuat oleh Bung Karno pada hari Minggu. Sejak pagi orang-orang sudah meninggalkan rumah menuju Pantai Tanjung Kalian. Bung Karno, KZ Abidin, Mr. Ali Sastroamidjojo berjalan di depan memimpin perjalanan. Pemuda-pemudi dan seluruh lapisan masyarakat ikut andil dalam kegiatan di Pantai Tanjung Kalian ini.

2. Merumuskan Naskah Diplomasi Kedaulatan Republik Indonesia

Perundingan dengan Belanda sejak proklamasi kemerdekaan RI telah berperan besar dalam dunia diplomasi Republik Indonesia (Roem, 1989:4).

Diasingkannya para tokoh republik Indonesia di Bangka membuat banyak kegiatan yang digunakan untuk melaukan pengembalian kedaulatan dilakukan di tempat pengasingan. Perumusan naskah dalam diplomasi kedaulatan republik Indonesia merupakan salah satu cara agar tonggak kedaulatan Negara Republik Indoneisa kembali.

Saat merumuskan naskah diplomasi atau perundingan, Soekarno, Hatta, Mohammad Roem, Agus Salim dan Ali Sastroamidjojo merencanakan pertemuan dengan ketua BFO. Badan Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO*) merupakan badan yang beranggotakan negara bagian dan daerah otonom bentukan Belanda di Indonesia. BFO didirikan oleh Belanda, pada 7 Juli 1948 di Bandung. BFO dibentuk Belanda untuk menandingi kekuasaan Republik Indonesia (RI), tetapi pada akhirnya BFO ikut membantu RI memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. BFO menyadari bahwa posisi RI tidak akan pernah berubah dalam pandangan bangsa Indonesia. RI telah menjadi lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan.

Tanggal 21 Januari 1949 pertemuan dengan BFO dapat dilaksanakan delegasi BFO terdiri dari Mr. Djumhana serta Dr. Ateng yang kemudian bertemu dan berunding dengan Soekarno dan Mohammad Hatta. Hasil dari pertemuan tersebut yakni Hatta mengajukan syarat diplomasi atau perundingan dapat dilaksanakan dengan dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta dan penarikan pasukan Belanda dari Wilayah RI sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan. Perundingan tersebut

dilakukan di ruangan meja makan, untuk bahan perundingan. Wawancara dengan Bapak Alfani selaku pemerhati sejarah, 23 Oktober 2021).

Kemudian setelah merencanakan dan mempersiapkan perundingan maka tanggal 7 April 1949 terjadilah perundingan tersebut yang dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta dan Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem sebagai ketua delegasi Republik Indonesia serta Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua delegasi Republik Indonesia. Kemudian Belanda mengirimkan ketua delegasinya yakni Dr. Van Royen. Perundingan ini menjadi salah satu perundingan yang berperan penting dalam meraih kedaulatan. Sebuah langkah perjuangan diplomasi yang penting dalam membuka jalan hubungan baru bagi Indonesia dan Belanda sebagai 2 Negara yang berdaulat dan merdeka (kutementok.com). Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 dicapailah persetujuan. Persetujuan tersebut dikenal dengan Perundingan Roem-Royen atau *Van Roijen-Roem Statements*. Isi dari Perundingan Roem Royen yakni:

1. Memerintahkan pengikut yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap ke Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Tanggal 22 April 1949 Moh. Hatta menerima anjuran dari Tuan Cochran, bahwa ia harus datang ke Jakarta, berunding dengan Van Royen tentang batas daerah Yogyakarta, apabila pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

3. Diplomasi dalam Mengembalikan Kedaulatan RI

Di tempat ini, para tokoh kemerdekaan Indonesia menjalankan perannya sebagai pusat perjuangan Republik Indonesia kala itu. Di tempat pesangasingan Soekarno dan Mohammad Hatta serta beberapa tokoh lain yang disaingkan kerap kali dijadikan untuk tempat bermusyawarah menuju kedaulatan Republik Indonesia.

Saat kesempatan pertama Panitia Jasa-jasa Baik berkunjung ke Menumbing, maka terlihat bahwa para tahanan masih dikurung dalam ruangan terbatas 4 x 6 Meter. Kemudian sikap PBB dalam hal tersebut yakni dengan tetap mengakui Republik Indonesia, hal tersebut membuat sebagian besar perjuangan diplomasi Republik Indonesia beralih ke Bangka. Republik sudah mendapat hak mengeluarkan suara, sekalipun belum ikut belum ikut menentukan sudah mempunyai status mantap yang tidak dapat disangkal oleh siapapun yaitu: "*The Republic of Indonesian is a party in the dispute (with the Netherlands)*" (Roem, 1989:58-59).

Tanggal 5 Februari 1949 terdengar kabar bahwa KTN (Komisi Tiga Negara) datang ke Bangka bersamaan dengan rombongan kedua yang akan diasingkan dari prapat ke Bangka. Dengan Kapal Udara KTN datang Dr. Darma Setiawan, Prof. Soepomo, Dr. Leimena, Mr. Soejono (selaku delegasi Republik). Kemudian dari BFO datang dengan wakil Anak Agung Gde Agung (perdana Menteri Indonesia Timur), Dr. Ateng (Perdana Menteri Jawa Timur) dan Jahja (Hatta, 1982: 558).

Anggota Delegasi Republik (Soepomo, Soedjono dan Darmasetiawan) berangkat ke Bangka menemui M. Hatta untuk membahas Resolusi Dewan Keamanan di Pangkalpinang dan kembali ke Batavia pada hari Kamis sore. Selanjutnya kedatangan para anggota KTN (Komisi Tiga Negara) yang terdiri dari Australia, Belgia dan

Amerika, menemui Presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta. Para anggota yang datang kepesanggrahan Muntok pada saat itu antara lain Merle Cochram, Mr. Koets, Critchhley, Mc. Kahin, Hermans dan Prof. Lyle. KTN ini sendiri dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk mengawasi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia.



Pertemuan dengan utusan KTN (Komisi Tiga Negara)

(Sumber: Lembaga Kearsipan Daerah Bangka Barat)

Selain para anggota KTN yang datang ke Muntok, hadir pula utusan BFO (*Bijeenkomst Voor Federal Overleg*), Badan Permusyawaratan Federal yang dibentuk oleh Belanda untuk menandingi kekuasaan Republik Indonesia. Utusan lain yang datang ke Pesanggrahan Muntok yakni utusan UNCI (*United Nations Commissions for Indonesia*).

Hari Senin, mereka melakukan pertemuan dengan pemimpin Republik Indonesia di Mentok dan kembali ke Jakarta pada hari Selasa, 8 Februari 1949. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa Soekarno dan Hatta bersedia menjalin komunikasi dan pertemuan lanjutan untuk saling bertukar pandangan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda.

Perundingan- perundingan perwakilan Belanda, BFO dan Republik Indonesia yang dimediasi oleh DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa), baik GOC (*Good Office Committe*) atau KTN (Komisi Tiga Negara) dan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*). Mohammad Roem yang telah di beri kuasa penuh oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam mewakili Indonesia untuk menyatakan kesanggupan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949. Kemudian setelah berhasilnya perjanjian Roem Royen ini maka di Pesanggrahan Muntok menjadi tempat dimana diserahkan Surat Kuasa Kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta dari Ir. Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada bulan Juni 1949. Surat Kuasa tersebut dikonsep oleh Mohammad Hatta di Pesanggrahan Menumbing dan diketik oleh Abdul Gaffar Pringgodigdo. Penyerahan surat kuasa ini disaksikan oleh Mohammad Hatta, Mr. Roem dan Ali Satroamidjojo.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan butir pertama dari isi perjanjian Roem-Royen yang menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta maka pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan rombongan kembali ke Kota Yogyakarta dari pulau Bangka. Kemudian Bung Karno mengatakan satu sloka yang menggugah semangat kebangsaan bahwa "Dari Pangkalpinang Pangkal Kemenangan Bagi Perjuangan".

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan dapat disimpulkan bahwa, aktivitas politik yang dilakukan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada saat

pengasingannya di Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat tahun 1948-1949 adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Muntok
 - a. Mendekatkan diri dengan masyarakat Muntok dan hal tersebut dilakukan oleh Soekarno dengan mendatangi tempat keramaian masyarakat Muntok dan merayakan ulang tahun Soekarno bersama anak-anak Muntok
 - b. Berpidato dan ceramah yang membakar semangat nasionalisme warga Muntok seperti pada saat Soekarno datang di acara pernikahan Jusuf Rasidi.
 - c. Melakukan piknik bersama PORI (Perkumpulan Olahraga Republik Indonesia).
 - d. Mengadakan kursus politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Mohammad Hatta,
2. Merumuskan naskah diplomasi kedaulatan Republik Indonesia
Para pemimpin Republik Indonesia memanfaatkan waktu selama pengasingan di Pesanggrahan Muntok dan Pesanggrahan Menumbing dengan perundingan, perencanaan dan persiapan yang hal tersebut dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Mohammad Roem, Ali Sastroamidjojo bersama dengan wakil dari BFO yang menunjang kedaulatan RI dapat kembali lagi. Hasil dari pertemuan tersebut yakni Hatta mengajukan syarat diplomasi atau perundingan dapat dilaksanakan dengan dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta dan penarikan pasukan Belanda dari Wilayah RI sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan. Sehingga Soekarno dan Mohammad Hatta dalam pelaksanaannya tanggal 17 April 1949 perundingan tersebut dikenal dengan perundingan Roem Royen.
3. Diplomasi dalam mengembalikan Kedaulatan Negara Republik Indonesia
Diplomasi tersebut dilakukan dengan berbagai pihak seperti dengan utusan PBB (UNCI), BFO, dan KTN. Diplomasi tersebut dilakukan untuk membantu memulihkan kedaulatan Republik Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. 2007. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Bung Karno, PT Media Pressindo.
- Ahmadi, Abu. 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Akhmad Elvian, 2021. Pertemuan dan Perundingan di Pangkal Pinang. Babel. Diakses di <https://babelpos.sumeks.co/2021/12/28/pertemuan-dan-perundingan-di-Pangkalpinang/> Pada tanggal 19 Januari 2022.
- Bambang Haryo Suseno, S.H., M.Ec.Dev. 2021. Mengenang 7 Mei 1949; Statemet Roem Royen. Diakses di <https://kutementok.com/lintas-sejarah/mengenang-7-mei-1949-statement-roem-royen> . Diakses pada 19 Desember 2021
- Bambang Haryo Suseno, S.H., M.Ec.Dev. 2021. Pernikahan Jusuf Rasidi dan Soleha Said: Jejak Kedekatan Presiden Soekarno dengan Masyarakat Bangka. Diakes di <https://kutementok.com/artikel/pernikahan-jusuf-rasidi-dan-soleha-said-jejak-kedekatan-presiden-soekarno-dengan-masyarakat-bangka>. Diakses Pada 19 Desember 2021

- Erfan, Muhammad. 2020. Mengingat Sejarah Pesanggrahan Bung Karno dan Muntok. Muntok: Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Bangka Barat.
- Farid, Hilmar. 2013. Pengasingan dalam Politik Kolonial. *Jurnal Prisma*. 3 (2): 104-111.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kuswandi, H. 2015. Pengaruh Perang Kemerdekaan II Terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949. *Jurnal Artefak*. 3 (2): 207-220.
- Muhammad TWH, Drs.H. 2011. *Peristiwa Sejarah di Sumatera Utara*. Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI.
- Naskah Sumber Arsip (Pesanggrahan Menumbinng Aset Kajian Pustaka). Muntok: Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Daerah Bangka Barat.
- Naskah Sumber Arsip (Pesanggrahan Muntok Aset Sejarah Kota Pustaka). Muntok: Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Daerah Bangka Barat.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened., dan Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Roem, Mohammad. 1989. *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Seno, Dkk. 2012. *Bunga Rampai Sejarah Bengkulu: Bengkulu Dari Masa Kolonial Hingga Otonomi Daerah*. Jakarta: BPSNT Padang Press.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suseno, Bambang Haryo, Dkk. 2020. Kapita Selekta Penulisan Sejarah Lokal. Muntok: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Swastiwi, A. T., Sesangka A.N., & Hendri P. 2017. *Lintas Sejarah Perdagangan Timah Di Bangka Belitung Abad 19-20*. Tanjungpinang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau.
- Wasino, Hartatik. SE. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.
- Wawancara Bapak Alfani selaku Pemerhati Sejarah Kota Muntok, 23 Oktober 2021
- Wawancara Bapak Muhammad Ferhad Irvan selaku Kepala Sie Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Bangka Barat, 24 Oktober 2021
- Wulandari, Taat. 2014. *Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.